

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Kebijakan Akuntansi

2.1.1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan hanya menjadi pedoman tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administratif untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.

Berikut adalah pengertian kebijakan dari beberapa pendapat para ahli yang terkait:

Menurut Mustopadidjaja dalam Tahir (2014:21) menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan.

Menurut Nurcholis (2007:263), memberikan definisi kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal:

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat tahun 2014 dijelaskan bahwa kebijakan yang artinya kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan. Rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Menurut *Carl J. Federick* sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan (kesulitan) dan kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

2.1.2 Pengertian Akuntansi Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2013:1) Akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam suatu entitas atau

organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.

Menurut Hans Kartikahadi, dkk. (2016:3) pengertian Akuntansi adalah suatu sistem informasi keuangan, yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.

Menurut *Donald E Kieso*, (2008:1) Akuntansi keuangan adalah proses yang berakhir pada pembuatan akuntansi keuangan menyangkut perusahaan secara menyeluruh. Laporan tersebut bisa digunakan oleh pihak-pihak internal atau pihak eksternal.

Menurut Rizal Effendi. (2013:1) akuntansi merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran serta pelaporan informasi keuangan dalam ukuran moneter (uang) dalam suatu perusahaan atau organisasi yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka pengambilan keputusan.

Dari definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, dan pengkomunikasian hasil akhir berupa laporan keuangan yang mencerminkan keadaan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan / (investor).

2.1.3 Pengertian Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Beberapa jenis kebijakan akuntansi dapat digunakan

untuk subjek yang sama. Pertimbangan dan atau pemilihan perlu disesuaikan dengan kondisi perusahaan. Sasaran pilihan kebijakan yang paling tepat akan menggambarkan realitas ekonomi perusahaan secara tepat dalam bentuk keadaan keuangan dan hasil operasi.

Menurut PKAK (2015:46) Kebijakan Akuntansi adalah prinsip, dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan Bank Indonesia dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Menurut *Elden S Hendriksen* diterjemahkan oleh Marianus Sinaga (1996:109) mengatakan bahwa: “Kebijakan akuntansi adalah proses pemilihan metode pelaporan, alternatif, sistem pengukuran dan teknik pengungkapan tertentu diantara semua yang mungkin tersedia untuk pelaporan keuangan oleh suatu perusahaan”.

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (2002:1), Kebijakan akuntansi meliputi pilihan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi, peraturan dan prosedur yang digunakan manajemen untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Dari uraian-uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan akuntansi adalah prinsip khusus, dasar, konvensi, peraturan dan praktik yang diterapkan perusahaan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

2.2 Tujuan Kebijakan Akuntansi

- a. Tujuan umum kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Untuk tujuan umum dalam rangka

meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

- b. Tujuan khusus kebijakan akuntansi adalah memberikan acuan bagi:
 - 1. Penyusun laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam standar.
 - 2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai laporan keuangan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi.
 - 3. Pengguna laporan keuangan dalam memberikan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi.

Faktor-faktor lainnya yang harus dipertimbangkan dalam bentuk kerangka kebijakan akuntansi hanyalah salah satu informasi keuangan bagi individu. Keputusan mengenai kebijakan akuntansi harus mempertimbangkan sumber-sumber alternatif diluar akuntansi yang menyajikan informasi yang tersedia secara lebih efisien dan dengan biaya yang lebih rendah bagi perusahaan dan investor. Secara singkat tujuan kebijakan akuntansi berfokus pada para pemakai informasi keuangan.

2.3 Pemilihan dan Penerapan Kebijakan Akuntansi Keuangan

Jika suatu PKAK secara spesifik berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PKAK tersebut.

PKAK menentukan kebijakan akuntansi untuk menghasilkan laporan keuangan yang berisi informasi relevan dan andal atas transaksi, peristiwa dan kondisi lain. Kebijakan akuntansi tersebut tidak perlu diterapkan ketika dampak

penerapannya tidak material. Namun, tidak tepat untuk membuat atau membiarkan penyimpangan dari PKAK untuk mencapai suatu penyajian tertentu atas posisi keuangan dan surplus defisit.

PKAK dilengkapi dengan panduan untuk membantu BI dalam menerapkan persyaratan dalam PKAK. Panduan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PKAK bersifat wajib diterapkan. Sementara panduan yang bukan bagian tidak terpisahkan dari PKAK tidak berisi pengaturan untuk laporan keuangan.

Maka BI menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi untuk menghasilkan informasi yang:

- A. Relevan untuk kebutuhan pengambilan keputusan pengguna; dan
- B. Andal, dalam laporan keuangan yang:
 - 1) Menyajikan secara jujur posisi keuangan dan surplus defisit.
 - 2) Mencerminkan substansi ekonomi transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya, dan bukan hanya bentuk hukum.
 - 3) Netral, yaitu bebas dari bias.
 - 4) Pertimbangan sehat, dan
 - 5) Lengkap dalam semua hal yang material.

Dalam membuat pertimbangan yang dijelaskan di paragraf atas, BI:

- a. Mengidentifikasi dan menetapkan transaksi, peristiwa, atau kondisi lain sebagai transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang berbasis konvensional atau berbasis syariah, dan
- b. Mengidentifikasi dan menetapkan transaksi, peristiwa, atau kondisi lain sebagai transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat unik atau tidak unik, dan

- c. Mempertimbangkan keterterapan dari beberapa sumber yang dijelaskan Untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lain yang bersifat konvensional atau syariah yang unik atau tidak unik.

2.4 Pengertian Aset Tetap

Menurut PSAK 16, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Menurut Mulyadi (2016:4) Aset tetap mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aset lancar. Jika aset lancar dikendalikan pada saat konsumsinya, pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tersebut.

Menurut Nunuy Nur Afiah (2009:1) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan perusahaan atau instansi dimanfaatkan untuk kepentingan perusahaan.

Menurut Nelson Lam dan Peter Law (2014:46) Secara historis aset tetap mengacu pada aset berwujud yang dimiliki untuk tujuan jangka panjang. Akan tetapi, definisi formal aset tetap harus memasukkan (1) cara penggunaannya (2) jangka waktu kepemilikan oleh suatu entitas.

2.4.1 Jenis Aset Tetap

Akuntansi Aset Tetap, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Adapun jenis-jenis aset tetap antara lain:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional perusahaan dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, investaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap dipakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh untuk maksud dipakai dalam kegiatan operasional Perusahaan dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Aset tetap lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional perusahaan dan dalam kondisi yang siap dipakai.

- f. Kontruksi dan Pengerjaan Kontruksi dan pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

2.4.2 Karakteristik Aset Tetap

Akuntansi Aset Tetap, aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Adapun karakteristik aset tetap sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang umurnya tidak terbatas seperti tanah untuk letak perusahaan, pertanian dan peternakan.
- b. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya bisa diganti dengan aset yang sejenis, misalnya bangunan, mesin, alat-alat, kendaraan dan lain-lain.
- c. Aset tetap yang umurnya terbatas dan apabila sudah habis masa penggunaannya tidak dapat diganti dengan aset yang sejenis, misalnya sumber-sumber alam seperti tambang, hutan dan lain-lain. Aset tetap yang diganti dengan Aset yang sejenis penyusutan disebut depresiasi sedangkan penyusutan sumber alam disebut deplesi.

2.4.3 Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud.

- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap dapat diakui jika manfaat ekonomi masa depan dan resiko dapat diperoleh atau diterima oleh entitas tersebut dan nilainya dapat diukur dengan andal. Keandalan ini akan diperoleh bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya atau pada saat penguasannya berpindah dengan didukung adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan atau penguasaan secara hukum. Seperti sertifikat tanah, bukti kepemilikan bermotor, dan harta hibah (untuk aset donasi).

2.4.4 Perolehan Aset Tetap

Aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap semacam itu, walaupun tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomik masa depan dari suatu aset tetap yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset lain yang terkait. Dalam keadaan ini, perolehan aset tetap semacam itu memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai asset.

A. Pembelian Tunai

Aset tetap yang dibeli dengan tunai dicatat sebesar uang yang dikeluarkan untuk pembelian tersebut, ditambah dengan biaya-biaya lain sehubungan dengan pembelian tersebut. Bila ada potongan harga atau diskon maka harus dikurangi dari nilai perolehan. Tetapi jika diskon tersebut tidak diambil maka perusahaan harus melaporkannya sebagai *discount lost*.

Jurnal pembelian Tunai sebagai berikut:

D:	Aset Tetap	xxx	
K:	Kas		xxx

Jurnal Pembayaran Tunai jika Diskon tidak diambil:

D:	Aset Tetap	xxx	
D:	Discount loss	xxx	
K:	Kas		xxx

B. Pembelian Angsuran

Ada kalanya suatu aset tetap dibeli secara angsuran. Dalam hal demikian, kontrak pembelian dapat menyebutkan bahwa pembayaran akan dilakukan dalam sekian kali angsuran dan terhadap saldo yang belum bayar dikenakan bunga. Pembelian secara kredit merupakan salah satu cara untuk memperoleh suatu aset. Akan tetapi dengan cara ini timbulah pembayaran yang akan diangsur guna melunasi hutang akibat pembelian kredit ini.

Jurnal yang harus dilaksanakan pada saat perolehan angsuran:

D:	Aset Tetap	xxx	
----	------------	-----	--

dibebankan dalam tahun berjalan. Contohnya pertukaran peralatan lama dengan peralatan baru.

Jurnal yang dibuat jika laba atau *gain*

D:	Beban Penyusutan	xxx	
K:	Akumulasi Penyusutan		xxx
D:	Peralatan (baru)	xxx	
D:	Akumulasi Penyusutan	xxx	
K:	Peralatan (lama)		xxx
K:	Kas		xxx
K:	Keuntungan dan pertukaran		xxx

Jurnal yang dibuat jika rugi atau *loss*

D:	Beban Penyusutan	xxx	
K:	Akumulasi Penyusutan		xxx
D:	Peralatan (baru)	xxx	
D:	Akumulasi Penyusutan	xxx	
D:	Kerugian penyusutan	xxx	
K:	Peralatan (lama)		xxx
K:	Kas		xxx

2. Pertukaran Aset Tidak Sejenis

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pertukaran aset tidak sejenis adalah sebagai berikut:

- Aset yang dipertukarkan tidak sejenis, tetapi tidak termasuk dalam *Producing Assets*.
- *Cost* kedua aset tersebut diketahui nilai pasarnya

D. Perolehan aset Tetap dari Donasi / Hibah

Untuk menerima hadiah mungkin dikeluarkan biaya-biaya, tetapi biaya tersebut jauh lebih kecil dari nilai aktiva tetap yang diterima. Masalah yang dihadapi berupa nilai aktiva yang diterima nanti dilaporkan dalam neraca. Apabila terjadi hal seperti ini maka aktiva dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar seandainya aktiva tersebut dibeli, oleh karena aktiva perusahaan bertambah dan untuk penambahan itu perusahaan tidak ada pengeluaran maka pertambahan aktiva itu akan diimbangi dengan penambahan modal donasi dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh hadiah tersebut tidak menambah harga pasar aktiva untuk menentukan harga perolehannya tetapi harus dikurangkan dari modal donasi.

E. Aktiva yang dibuat sendiri

Harga perolehan aktiva yang diperoleh dengan membangun sendiri terdiri dari harga material dan tenaga kerja yang dibayar perusahaan ditambah biaya lain seperti listrik, solar, dan depresiasi peralatan milik perusahaan yang digunakan dalam pembangunan tersebut. Dalam hal ini mungkin juga terdapat biaya bunga, seandainya dana pembangunan berasal dari pinjaman pada pihak luar. Jika harga perolehan aktiva yang diperoleh dengan membangun sendiri ternyata lebih rendah dari harga pasar aktiva sejenis, maka perusahaan tidak boleh mengakui adanya keuntungan.

2.4.5 Pengukuran Aset Tetap

PSAK No.16 memberikan pilihan kepada perusahaan dalam menentukan kebijakan akuntansi untuk menerapkan metode atau model pengukuran aset tetap. Model manapun yang diadopsi oleh suatu perusahaan, maka harus menerapkan kebijakan tersebut bagi seluruh kelompok dari aset tetap (*plant, property, equipment*). Terdapat dua macam metode atau model pengukuran yang dapat diterapkan oleh perusahaan guna melakukan pengukuran terhadap aset tetapnya dengan dasar model pada PSAK No.16 tahun 2007 sebagai berikut:

a. Model Biaya (*cost model*)

Aset tetap dapat diperoleh dari pembelian, pembangunan, hibah, dan pertukaran dengan aset yang lainnya. IAS 16 dan PSAK 16 mengatur bahwa suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Rumus yang digunakan dalam menghitung *cost model* adalah biaya perolehan (akumulasi penyusutan + akumulasi penurunan nilai).

b. Model Revaluasi (*revaluation model*)

Setelah pengakuan sebagai aset tetap, perusahaan harus menilai kembali aset tetapnya secara berkala sesuai dengan nilai pasar wajar. Frekuensi revaluasi aset tetap dilakukan tergantung pada materialitas perbedaan nilai aset tetap yang direvaluasi.

2.4.6 Biaya Perolehan Aset Tetap

Suatu aset tetap yang memenuhi kualifikasi agar dapat diakui sebagai aset pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Adapun biaya perolehan yang dijabarkan dalam PSAK No.16 (2007:7.16) antara lain:

1. Harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan setelah dikurangi diskon pembelian dan potongan lainnya.
2. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa asset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen.
3. Estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset.

PSAK No.16 (2007:8.19) juga memberikan contoh biaya-biaya yang bukan merupakan biaya perolehan aset tetap, antara lain:

- a) Biaya pembukaan fasilitas baru
- b) Biaya pengenalan produk baru (termasuk biaya iklan dan aktivitas promosi)
- c) Biaya penyelenggaraan bisnis di lokasi baru atau kelompok pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf) dan Administrasi dan biaya *overhead* umum lainnya.

Pada dasarnya, biaya-biaya yang dikeluarkan atas aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi empat tahap, yaitu tahap pendahuluan, sebelum perolehan, perolehan atau konstruksi, dan pemakaian.

Tahap pendahuluan terjadi sebelum pihak perusahaan yakin atas kemungkinan dilakukannya pembelian aset tetap. Selama tahap ini, perusahaan biasanya akan melakukan studi kelayakan dan analisis keuangan untuk menentukan kemungkinan diperolehnya aset tetap. Biaya-biaya yang

dikeluarkan dalam tahap pendahuluan ini tidaklah dapat dikaitkan dengan aset tetap tertentu, sehingga harus diperlakukan sebagai pengeluaran pendapatan.

Pada tahap pra perolehan, keputusan untuk membeli aset tetap telah menjadi mungkin, namun belum terjadi. Biaya-biaya yang dikeluarkan dalam tahap ini, seperti biaya survey, sudah dapat dikaitkan dengan aset tetap tertentu yang akan dibeli sehingga harus diperlakukan sebagai pengeluaran modal.

Dalam tahap perolehan atau konstruksi, pembelian aset tetap terjadi atau konstruksi telah dimulai, namun aset tersebut belum siap untuk digunakan. Biaya-biaya yang terkait langsung dengan aset yang dibeli harus dikapitalisasi dalam akun aset tetap tersebut. Contohnya adalah harga beli mesin, pajak, ongkos angkut, asuransi pengangkutan, instalasi, dan biaya uji coba.

Dalam tahap pemakaian, aset tetap telah siap digunakan. Sepanjang tahap ini, aset tersebut seharusnya disusutkan. Segala aktifitas perbaikan dan pemeliharaan atas aset yang sifatnya normal dan rutin harus dicatat langsung ke dalam akun beban untuk periode bersangkutan. Sedangkan biaya yang terjadi untuk memperoleh tambahan komponen aset atau mengganti komponen yang sudah ada, haruslah dikapitalisasi sepanjang biaya-biaya ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap atau memperpanjang masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

2.4.7 Penyusutan Aset Tetap

Dasar yang ditetapkan untuk penyusutan merupakan fungsi dari dua factor: biaya awal dan nilai sisa atau pelepasan. Nilai sisa (*salvage value*) adalah estimasi jumlah yang akan diterima pada saat aktiva itu dijual atau ditarik dari

penggunaannya. Nilai sisa merupakan jumlah di mana aktiva harus diturunkan nilainya atau disusutkan selama masa manfaatnya.

Metode penyusutan (depresiasi) ditentukan guna memiliki alokasi semantik dari nilai aset yang disusutkan. Pola ini harus mencerminkan pada nilai manfaat ekonomis aset di masa depan yang diharapkan dapat digunakan oleh perusahaan.

a. Metode Garis Lurus (*straight-line*)

Mempertimbangkan penyusutan sebagai fungsi dari waktu, bukan fungsi dari penggunaan. Metode ini telah digunakan secara luas dalam praktek karena kemudahannya. Prosedur garis-lurus secara konseptual sering kali juga merupakan prosedur penyusutan yang paling sesuai. Apabila keusangan bertahap merupakan alasan utama atas terbatasnya umur pelayanan, maka penurunan kegunaanya dari konstan dari period ke periode. Maka depresiasi metode selama satu tahun adalah sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Biaya} - \text{Nilai Sisa})}{\text{Estimasi Umur Pelayanan}} = \text{Beban Penyusutan}$$

b. Metode Saldo Menurun Ganda (*double declining balance method*)

Dalam menentukan persentase dalam metode ini berupa beberapa kelipatan dari metode garis lurus dihitung dengan cara melipat gandakan persentase penyusutan. Dalam metode saldo menurun nilai sisa tidak dikurangkan dalam menghitung dasar penyusutan. Berdasarkan metode saldo menurun ganda, penyusutan nilai aset tetap dilakukan dengan mengalokasikan penurunan nilai selama masa manfaatnya sebagaimana halnya dalam metode garis lurus. Akan tetapi, persentase besarnya

penyusutan adalah dua kali dari persentase yang dipakai dalam metode garis lurus. Rumus yang digunakan adalah:

$$\text{Beban Penyusutan} = \text{Tarif Penyusutan} \times (\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa})$$

- Beban penyusutan = Tarif penyusutan x Dasar penyusutan
- Dasar penyusutan = Nilai buku awal periode

c. Metode jumlah unit produksi (sum of the unit of production method)

Dalam metode ini umur kegunaan aset ditaksir dalam satuan jumlah unit, hasil produksi, beban depresiasi dihitung dengan dasar satuan hasil produksi, sehingga depresiasi tiap periode akan berfluktuasi sesuai dengan fluktuasi dalam hasil produksi untuk menghitung depresiasi dengan metode unit produksi adalah sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Biaya} - \text{Nilai Sisa}) \times \text{Jam tahun ini}}{\text{Total estimasi jam}} = \text{Beban Penyusutan}$$

Untuk memperoleh besarnya beban penyusutan periodik secara tepat dari pemakaian suatu aset, terdapat tiga faktor yang perlu dipertimbangkan yang dikemukakan oleh Weygandt, Kieso & Kimmel (2011: 393), antara lain:

1. Biaya

Nilai perolehan suatu aset mencakup seluruh pengeluaran yang terkait dengan perolehannya dan persiapannya sampai aset dapat digunakan. Jadi, disamping harga beli, pengeluaran–pengeluaran lain yang diperlukan untuk mendapatkan dan mempersiapkan aset harus disertakan sebagai harga

perolehan. Nilai perolehan aset umumnya mencerminkan nilai pasar pada saat aset diperoleh.

2. Masa manfaat

Dalam menghitung besarnya beban penyusutan, masa manfaat dapat diartikan sebagai suatu periode atau umur fisik dimana perusahaan dapat memanfaatkan aset tetapnya dan dapat juga berarti sebagai jumlah unit produksi atau jumlah jam operasional yang diharapkan diperoleh dari aset. Faktor – faktor fisik yang membatasi umur ekonomis suatu aset mencakup pemakaian, penurunan nilai (berhubungan dengan berlalunya waktu, dimana suatu aset tetap baik digunakan atau tidak digunakan akan mengalami penurunan nilai), dan kerusakan (penyebabnya dapat berupa kebakaran, banjir, gempa bumi, atau kecelakaan yang cenderung mengurangi atau mengakhiri masa manfaat suatu aset)

3. Nilai residu

Nilai residu merupakan estimasi nilai aset pada akhir masa manfaat. Besarnya estimasi nilai residu sangat tergantung pada kebijakan manajemen mengenai penghentian aset tetap dan juga tergantung pada kondisi pasar serta faktor–faktor lainnya. Apabila perusahaan menggunakan asetnya hingga secara fisik benar–benar usang dan tidak dapat memberikan manfaat lagi, maka aset tersebut dapat dikatakan tidak memiliki nilai sisa atau nilai residu.

2.4.8 Penurunan Nilai Aktiva Tetap

Proses penentuan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

- a) Menelaah kejadian dan perubahan situasi untuk kemungkinan penurunan
- b) Jika kejadian dan perubahan itu menyebabkan penurunan, tentu apakah jumlah arus kas bersih masa depan yang diharapkan dari aktiva jangka panjang lebih kecil dari nilai tercatat aktiva. Jika lebih kecil, ukur kerugian penurunan.
- c) Kerugian penurunan adalah jumlah di mana nilai tercatat aktiva lebih besar dari nilai wajarnya. Setelah kerugian penurunan dicatat, nilai tercatat aktiva jangka panjang yang telah dikurangi sekarang diperimbangkan sebagai dasar biaya baru. Kerugian penurunan tidak dapat direstorasi sebagai aktiva yang ditahan untuk digunakan. Jika aktiva diharapkan akan dilepaskan, maka aktiva yang diturunkan nilainya itu harus dilaporkan pada yang terendah antara biaya atau nilai realisasi bersih. Aktiva itu tidak disusutkan. Aktiva itu dapat diterus dinilai kembali, selama penghapusan tidak lebih besar dari nilai tercatat sebelum penerapan.

Menurut PSAK No.16 (revisi 2007), dalam menentukan apakah suatu aset tetap mengalami penurunan nilai, entitas menerapkan PSAK 48: Penurunan Nilai Aset. Pernyataan tersebut menjelaskan bagaimana entitas *me-review* jumlah tercatat asetnya, bagaimana menentukan nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset dan kapan mengakui atau membalik rugi penurunan nilai.

2.4.9 Penyajian aset tetap Pada Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk atau hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yang berisi informasi kuantitatif mengenai keuangan perusahaan.

Laporan keuangan dipergunakan sebagai salah satu bahan dalam proses pengambilan keputusan baik oleh pihak intern maupun pihak ekstern. Aktiva tetap disajikan pada laporan keuangan berupa neraca dalam kelompok aktiva tetap. Mulyadi (2002:183) menyatakan bahwa prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktiva tetap di neraca adalah sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian aktiva tetap harus dicantumkan di dalam neraca.
- b. Aktiva tetap yang digadaikan harus dijelaskan.
- c. Jumlah depresiasi akumulasi dan biaya depresiasi untuk tahun kini harus ditunjukkan dalam laporan keuangan.
- d. Metode yang digunakan dalam penghitungan depresiasi golongan besar aktiva tetap harus diungkapkan di dalam laporan keuangan.
- e. Aktiva tetap harus dipecah ke dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material.
- f. Aktiva tetap yang telah habis didepresiasi namun masih digunakan untuk beroperasi, jika jumlahnya material harus dijelaskan.

Aset tetap disajikan dalam neraca dan posisinya yang tepat setelah perhitungan investasi, atau pada bagian tengah dalam susunan penyajian aset. Aset tetap dicatat sesuai dengan nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi penyusutan tahun berjalan. Penyajian asset tetap dalam neraca adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Neraca Saldo Per 31 Desember 20xx.

Aset		Liabilitas & Ekuitas	
<u>Aset Lancar</u>		<u>Liabilitas lancar</u>	
Kas	xxx	Utang usaha	xxx
Piutang usaha	xxx	Utang wesel	xxx
Cadangan kerugian piutang	(xxx)	Utang gaji dan upah	xxx
Piutang lain - lain	xxx	Total liabilitas lancar	xxx
Persediaan	xxx	<u>Liabilitas jangka panjang</u>	
Beban habis pakai	xxx	Utang obligasi	xxx
Total aset lancar	xxx	Total Liabilitas	xxx
Aset tetap		<u>Ekuitas Pemegang Saham</u>	
Tanah	xxx	Modal saham	xxx
Bangunan	xxx	Laba ditahan	xxx
Akum. penyus bangunan	(xxx)	Total Ekuitas Pemegang Saham	xxx
Kendaraan	xxx	Total Liabilitas &	xxx
Akum. penyus kendaraan	(xxx)	Ekuitas pemegang saham	
Total aset tetap	xxx		
Total Aset	xxx		